

# KEBHINEKAAN: SEBUAH RETORIKA?

**Dewa Agung Gede Agung**

Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri malang

**Abstrak:** Secara nasional maupun lokal, keragaman tidak bisa dihindari, baik keragaman agama, budaya, etnis dan sebagainya. Keragaman merupakan keniscayaan dalam sebuah masyarakat post-kolonial seiring dengan meningkatnya intensitas komunikasi global. Semua orang sadar akan semua itu, karena sudah terdapat pada lambang negara yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika”. Istilah ini bukan saja diposisikan sebagai jargon politik sebagai satu *nation*, tetapi seharusnya menjadi pedoman yang merupakan hasil renungan pendiri bangsa berdasarkan kondisi objektif dari negara Indonesia. Peningkatan tensi konflik semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bernuansa SARA baik yang bersifat *manifest* maupun *latten*, membuktikan belum dihayati dan diaplikasikannya makna dari istilah tersebut, artinya baru dalam tatanan “retorika”. Perilaku kebhinekaan tidak perlu diretorikakan dengan bahasa yang indah, karena seseorang bisa berkata-kata bijak, tetapi belum tentu bisa berperilaku bijak.

**Kata-kata kunci:** perilaku kebhinekaan, sebuah retorika

*Abstract: Nationally and locally, diversity can not be avoided, whether the diversity of religious, cultural, ethnic and so forth. Diversity is a necessity in a post-colonial society as the intensity of global communications increases. Everyone is aware of it all, because it already exists on the state symbol that reads "Bihneka Tunggal Ika". This term is not only positioned as a political jargon as a nation, but should be a guide which is the result of the founders' reflection based on the objective condition of the Indonesian state. Increasing the tension of conflicts of the Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) slogan, both manifest and latten, proves that they have not yet appreciated and applied the meaning of the term, meaning new in the "rhetorical" order. Behavior diversity does not need to be re-fabricated in a beautiful language, because one can speak wisely, but not necessarily be able to behave wisely.*

**Keywords:** *behaviour of diversity, a rhetoric*

## PENDAHULUAN

Banyak orang mempunyai kemampuan berkata-kata bijak dengan intonasi yang menarik, susunan kata-kata yang teratur yang dibarengi oleh gerak tubuh yang menarik pula sehingga pendengarnya bisa terbuai. Pertanyaannya, apakah yang menghumber kata-kata bijak tersebut sudah “berperilaku bijak” ?, kalau yang dikatakan tidak sesuai dengan yang dilakukan itu

hanya “sebuah retorika”. Retorika adalah kepandaian menggunakan bahasa secara efektif sehingga menimbulkan rasa indah (Badudu, 1996: 1165). Begitu juga dengan kata yang sudah menjadi perbendaharaan umum, bahwa Indonesia adalah negara yang “bhineka, inklusif, plural, cinta damai, toleran, religius”, dan sebagainya. Di dalam praktik bernegara pada akhir millennium ke-2 prinsip-prinsip tersebut terbukti masih dalam tataran slogan. Berarti semua itu hanyalah sebuah retorika. Dalam tatanan

aplikasi yang dibutuhkan bukanlah orang yang “berkata-kata bijak”, tetapi orang yang “berperilaku bijak” dalam mengatasi perbedaan, terutama perbedaan agama dan etnis. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan gabungan antara slogan, lisan dan perilaku di antara beberapa orator.

Hidup bukan sekedar kata-kata, verbalitas, tetapi diperlukan tindakan nyata, terlebih lagi bagi para tokoh yang menjadi panutan dalam masyarakat. Harmoni yang menggambarkan potret utuh segenap komponen dalam masyarakat bangsa, kebangsaan dan kenegaraan, sehingga perwujudannya harus juga mencerminkan gambaran yang tidak sebatas verbal-formal dan di atas permukaan yang sering bersifat umum, melainkan harus merupakan kondisi objektif yang meliputi rincian riil, akurat dan benar. Apabila gambaran tersebut tidak memenuhi kriteria dimaksud, itu hanyalah sekedar retorika atau jargon-jargon kosong, gambaran semu yang tidak lebih adalah rekayasa, *kamufase* dan fatamorgana (Ronowidjojo, 2010: 59-60).

Mengapa ini perlu kita renungkan, mengingat konflik horizontal yang terjadi di Indonesia pasca reformasi umumnya bernuansa agama dan etnis. Sejak tahun 1980-an, terjadi pergeseran istilah, apa yang dikenal dengan istilah “rasisme baru”. Istilah ini sebagai label praktis terhadap perubahan-perubahan dalam hakekat penguasaan dan ketidaksejajaran etnik dalam masyarakat multikultur kontemporer. Rasisme baru berfokus pada perbedaan-perbedaan kultural, posisi inferior/superior biologis-genetis, sehingga menyebabkan menindas kelompok lain (*orthes*) melalui kerugian “sosial-ekonomis” (Dijk, 1999:4).

Sejak reformasi banyak terjadi konflik-konflik bernuansa agama seperti di Ambon, Kalimantan Barat, dan berbagai peristiwa sparatisme sebagai bukti cukup

kuat nasionalisme Indonesia mengalami kemunduran. Begitu juga meningkatnya sentimen-sentimen lokal dalam melawan pemerintah pusat untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas (Azra, 2003:74). Menurut telusuran *KOMPAS.com* — Identitas keberagaman di Indonesia terus diuji dengan beragam tindakan diskriminasi. Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen), kekerasan jender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen). Diakses, Sabtu, 16 April 2016 (*Kompas*, 2015)

Struktur sosial ternyata mempunyai peranan penting dalam menghasilkan kehidupan yang harmonis, itu sangat disadari oleh negara-negara di dunia ini. Seperti pandangan Ai Guo Han, bahwa nampaknya mereka percaya bahwa struktur sosial yang lebih efektif dan efisien akan menghasilkan keharmonisan sosial, terutama “kearifan lokal”. Namun, harmoni sosial adalah menyangkut psikologis sosial. Fenomena yang ditentukan oleh interaksi antara nilai-nilai sosial seseorang, dan masyarakat. Orang mencapai harmoni sosial ketika mereka merasa nilai-nilai dan keinginan mereka dicapai dalam masyarakat. Mereka harus memproduksi struktur sosial dan psikologis sosial yang kuat jika mereka ingin berhasil mencapai keselarasan dengan alam, masyarakat, dan diri mereka sendiri (Han, 2008:113).

Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: pendekatan ekonomi, sosial-budaya, politik, agama, bahkan dengan pendekatan nilai-nilai lokal (*local wisdom*). Menurut

Abdurrahman Wahid, penanaman nilai-nilai moral dapat dilakukan melalui pendidikan dan kearifan lokal. Adat-istiadat dalam suatu masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adat yang berlaku menjadi landasan moral dalam berperilaku. Kearifan lokal yang terbentuk dari tradisi dan lokalitas ajaran mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang (Nurcholish, 2014:150). Kearifan lokal sebagai kebudayaan, bukan sekedar wadah dari adat-adat, kegunaan-kegunaan, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan, melainkan sebagai serangkaian mekanisme kontrol, kontrol sosial (social control) dari rencana-rencana, anjuran-anjuran, aturan-aturan, instruksi-instruksi untuk memandu perilaku demi terciptanya social order (Leege & Kellstedt, 2006:12-13). Ini memerlukan gerakan sosial yang bersifat positif. Menurut Marcionis dalam Sukmana, social movements adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru menuju ke tatanan yang lebih baik (Sukmana, 2016, hal. 4-5). Indonesia adalah negara yang serba beda dilihat dari sisi agama, budaya, etnis dan sebagainya. Perbedaan bukan biang keladi dari sebuah krisis, tetapi “kebodohan” dan “kepicikan”, begitu juga konflik adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang “bodoh” dan “picik” dalam menyelesaikan masalah (As-Sirjani, 2015:51).

#### **Kebhinekaan Sebuah Kodrati**

“Etika kodrati” dalam kehidupan beragama tidak membenarkan konflik apapun alasannya, tetapi selalu menjaga kesejahteraan dan kedamaian bagi penghayat agama. Etika kodrati yakni etika yang penuh dengan penghargaan yang dalam terhadap perbedaan religiusitas yang menggerakkannya, dan hal ini nampaknya

kemungkinan dapat mengantisipasi konflik-konflik horisontal. Etika kodrat cocok dengan prinsip-prinsip etika yang ditemukan di atas iman pada transendensi atau adi kodrati. Etika kodrat merupakan etika yang bersifat komunikatif-persuasif. Etika kodrat bersifat komunikatif karena manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, pada hakekatnya memerlukan komunikasi vertikal dan horisontal, sehingga kebaikan selalu menang dalam menghadapi kemungkinan konflik. Realitas toleransi menunjuk betapa “etika kodrati” berperan dalam masyarakat beragama. Etika kodrat bersifat persuasif karena manusia pada hakekatnya cenderung menggerakkan ke arah antusias dalam kehidupan sehari-hari yang nyaris tidak terelakkan dari kondisi konflik.

Saat ini, pluralitas adalah bersifat kodrati, masalah realitas, sehingga diperlukan pandangan “pluralitas realitas”. Terdapat beberapa karakteristik dasar dari suatu masyarakat plural, yakni; 1) terjadinya polarisasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain, 2) memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer, 3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, 4) secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang lain, 5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi, serta 6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain (Nasikun, 2014:40-41).

Penggambaran struktur masyarakat Indonesia secara umum ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasar

perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2014:34-35). Dalam perspektif agama maupun sosiologis, homogenitas, tidak akan ada di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Gus Dur mengatakan, “pluralisme sebenarnya merupakan ajaran nilai-nilai kebangsaan yang hakiki berangkat dari realitas sosiologi keindonesiaan, berangkat dari penghargaan yang tinggi terhadap hakekat dan eksistensi kemanusiaan”. Kita tidak bisa menghindari diri dari kenyataan multi-etnik dan komunitas dengan budaya dan agama masing-masing, yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari fondasi filosofi bangsa Indonesia yang berbhineka. Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gur Dur mengembangkan pemikiran dan gerakan sosial budaya untuk penghargaan terhadap eksistensi pluralisme, sebenarnya ia tengah melakukan penyadaran kepada masyarakat dan penyelenggara negara untuk terus memperkuat bangunan keindonesiaan. Sebaliknya bagi siapapun yang menghalanginya, boleh jadi merupakan bagian dari segelintir warga negara yang secara tidak langsung berupaya merapuhkannya, dan pasti ini tidak diinginkannya (Ida, 2010:7-8).

Multikultural adalah fakta demografis, ideologi yang terkait dengan keragaman budaya (Anonim, 2015:748). Multikulturalisme sangat erat kaitannya dengan “politik identitas”, “politik perbedaan” dan “politik pengakuan”, yang semuanya menganggap pengakuan yang tepat dari segala keragaman (Colombo, 2015:801). Multikulturalisme tidak hanya mengacu pada koeksistensi pluralitas budaya tetapi konteks sosial yang mendorong

kemungkinan interaksi yang harmonis dari budaya yang berbeda. Dialog di sini tidak terbatas pada pengertian harfiah dari istilah, melainkan adalah sebuah metafora untuk hubungan damai dan harmonis, saling percaya dan kekaguman serta diinformasikan oleh semangat dan substansi multikulturalisme (Alatas, 2006:1-2). Menurut Supriyono, “pluralisme di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai dari beragam etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, sampai keberagaman agama”. Supriyono mengutip dari pandangan K.H. Hasyim Muzadi (2008), bahwa konflik berlatar agama terjadi karena belum ada keseimbangan antara agama sebagai nilai kognitif dan nilai universal. Ketika keduanya tidak seimbang, akan muncul eksklusif agama. Di luar Islam atau Kristen nilai-nilai itu sama, misalnya bahwa orang berbuat baik pasti dapat pahala (Supriyono, 2016:3-4). Seperti yang dikatakan oleh Belinda, “bahwa pengembangan sifat multikultural hendaknya dibantu juga dengan berbagai acara di media siaran baik yang bersifat nasional maupun global. Ini cara yang tepat untuk menciptakan sikap yang mengikat antar individu, antar warga negara di dunia” (Belinda, 2002:13-14). Menurut penulis di Indonesia, hal semacam ini perlu ditingkatkan. Diperlukan siaran-siaran yang bernuansa harmonisasi, film, sinetron yang bernuansa multikultural. Hal semacam ini tidak perlu ditakuti bagi orang beriman kuat terhadap keyakinannya, karena ketakutan merupakan wujud lemahnya iman seseorang.

Pendidikan faktor penting dalam penanaman sifat multikultural karena dengan pendidikan secara ideal akan membentuk manusia yang cerdas. Pendidikan multikultural akan memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia yang

adil dan bebas dalam keberagaman (Teasley & Tyson, 2007:390-391). Apalagi Indonesia sebagai negara yang melabeli diri sebagai negara demokrasi. Seharusnya dalam pluralisme demokrasi akan tumbuh dengan subur atau sebaliknya, karena mereka dibiasakan dengan kehidupan yang berbeda, keragaman, pluralisme, multikulturalisme. Dengan demikian akan terbiasakan dengan berbagai kesempatan berdiskusi dengan berbagai perbedaan pendapat, melakukan transformatif berbagai isu yang bersifat lintas budaya yang akan memunculkan rekonstruksi sosial (Dylla & Faircloth, 2014:111). Kondisi semacam ini hendaknya diawali dengan kurikulum yang berwawasan multikultural. Hal yang terpenting adalah kemampuan guru dalam menyampaikan hal-hal sebagai berikut; (a) multikulturalisme sebagai komunitas yang menguntungkan, (b) klaim untuk menghindari diskriminasi kelompok minoritas, dan (c) penolakan rasisme dan membangun sekolah sebagai lingkungan toleran di mana semua orang bisa bergaul (Kirkham, 2016:1). Seorang agen/aktor, apakah itu tokoh struktural maupun kultural harus mengerti bahwa “kasih” harus diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan di dalam realitas agama dan kebudayaan (Ule, 2015:1-4). Kearifan lokal sebagai salah satu unsur kebudayaan dan menjadi unsur penting dalam kemajemukan, menjadi dasar kehidupan yang berpratikemanusiaan. Jadi “iman” sebagai bentuk pengetahuan dan kecerdasan yang khas, yang lahir dari kepekaan terhadap rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Ule, 2015:163).

Perdamaian positif sebagai salah satu pesan yang harus dicapai melalui pendidikan, untuk mencapai kondisi damai positif memang tidaklah mudah. Perlu upaya-upaya kultural dan struktural. Upaya kultural antara lain dengan menghidupkan

kembali kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di tiap daerah di seluruh tanah air. Harmoni diperlukan perjuangan inilah yang mengkrystal menjadi ke Indonesiaan, yang menjadikan kita sebagai bangsa yang dilimpahi berkat rahmat oleh Tuhan sehingga dapat memiliki simpul-simpul kekayaan yang humanis yang tidak ternilai harganya. Hampir di setiap daerah mempunyai kearifan lokal yang menekankan akan harmonisasi antar sesama. Di dalam masyarakat Jawa; dikenal ada konsep *Rukun agawe santosa*, di Sulawesi Tengah; *sintuwu maroso* (bersatu teguh); Minangkabau; *tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin*; Bali; *manyama braya, tatwamasi*, Sulawesi Utara; *sitou timou tou, baku beking pandai, torang samua basudara*, dsb. (Ronowidjojo, 2010:59-60).

Secara struktural, mau tidak mau kita harus segera dan secara masif mengimplementasikan pendidikan perdamaian (*peace education*) di semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi (Nurcholish, 2015:213). Sebagai lembaga pendidikan sekolah memberi arti bagi peserta didik karena merupakan proses internalisasi dalam melakukan hubungan dengan sesama, sekaligus untuk belajar berinteraksi, bekerja sama, hidup berdampingan secara damai, saling memahami, saling menghormati, dan menambah pengalaman hidup dalam konteks kemajemukan atau kebinekaan (Nurcholish, 2015: 22).

Peran tokoh tersebut sangat diperlukan supaya tidak terjadi dominasi terhadap subdominasi. Menurut Bourdieu, dalam masyarakat multikultural biasanya akan terjadi kekerasan simbolik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ini akan terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan memproduksi

dan mengembangkan dominasi yang akan berkontribusi terhadap pemberdayaan kelompok subordinasi (Schubert, 2002: 1088). Karena itu tokoh-tokoh struktural dan kultural selalu berusaha menyadarkan cara hidup dalam masyarakat multikultural. Menurut McCabe, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya; menanamkan sifat multikultural yaitu; “(1) mengakui dan menghargai perbedaan, (2) pengajaran dan pembelajaran melalui program formal dan informal interaksi, dan (3) menghubungkan beragam individu dan organisasi melalui persahabatan dan aliansi organisasi” (McCabe, 2011:522).

Peranan tokoh agama dalam memberikan khutbah-khutbah tentang toleransi beragama di rasa masih sangat signifikan dan urgen, bersamaan dengan gejala masih mengentalnya sentimen-sentimen keagamaan di berbagai kawasan di negeri kita. Fenomena ini tentu merupakan tantangan bagi para cendikia untuk segera merumuskan sistem, pola sebagai media hidup toleransi beragama di Indonesia. Ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, apakah itu pemuka agama, tokoh adat atau masyarakat untuk memahami umatnya akan hakekat toleransi sesuai ajaran agama yang dianutnya. Kondisi semacam ini diharapkan dapat membangun hubungan intern dan ekstern antarumat beragama yang lebih baik dapat segera terwujud, bukan lagi hanya dalam awang-awang, keinginan dan teori semata, melainkan dalam kehidupan nyata sehari-hari (Zein, 2014:68).

Han Kung mengatakan perlunya “etika global” yang berlaku dalam skala makro untuk membuka jalan menuju kedamaian (Philips, 2016:88), dikatakan; “.....tidak ada keberlangsungan hidup tanpa sebuah etika dunia. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian diantara agama-agama. tidak ada perdamaian di antara

agama-agama tanpa dialog di antara agama-agama.....”. kenali perbedaan kalau ingin damai, jika kita berkenalan, maka kita dapat melihat kesamaan yang begitu banyak yang telah menyatukan kita dengan saudara-saudara kita sesama manusia (As-Sirjani, 2015:5). Semua agama pada prinsipnya mengajarkan kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya sebagai dasar hukum yang utama. Seperti yang dikatakan oleh Smith (Smith, 2008: 414):

“...bukanlah masing-masing agama itu mengandung bentuk tertentu dari “hukum utama”, hukum cinta akan semua manusia ?, bukankah semua agama itu beranggapan bahwa sikap mementingkan diri sendiri itu merupakan sumber kesulitan hidup manusia dan berusaha untuk membantu manusia itu untuk mengatasi kesulitan itu ?, bukankah setiap agama itu mengakui adanya satu dasar Ilahi yang bersifat universal dari mana berasal seluruh manusia ini, dan dimana harus dicari kebaikan manusia yang sebenarnya itu ?. Jika semua kebenaran yang diperlukan bagi keselamatan manusia itu bisa ditemukan dalam suatu agama, maka kebenaran itu juga bisa ditemukan dalam tiap-tiap agama besar lainnya.....”

Konsep menyayangi dan santun serta mengormati pemeluk agama lain adalah ajaran utama agama, karena dalam beragaman bukan saja masyarakat dituntut untuk memperdalam pemahaman dan kepatuhan religius mereka melainkan juga dianjurkan untuk meningkatkan kepribadian mereka. Dengan kata lain, agama di samping berusaha untuk meningkatkan sikap-sikap “keberagamaan” (*religiusitas*), para

pemeluknya juga berusaha membina akhlak mereka akan “keberagaman”. Dengan pembinaan keberagaman dalam keberagaman ini diharapkan muncul manusia yang bertqwa, dengan pembinaan akhlak sehingga akan muncul manusia yang berperadaban yang menghargai kedirian orang lain dan memberikan tempat bagi perbedaan pemahaman atau bahkan keyakinan di antara mereka. Semua ini sebenarnya sudah disediakan secara langsung oleh agama itu sendiri. Agama pada dasarnya tidak membentuk para pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang merugikan kalangan lain (Turmudi, 2000:147-148). Dalam rangka membina kerukunan antarumat beragama di Indonesia, Ulama Komisi Fatwa sudah merekomendasikan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama. Rekomendasi tersebut adalah:

“...*pertama*, mendesak pemerintah agar segera membuat Undang-Undang (UU) tentang kerukunan umat beragama dengan alasan untuk mendukung tercapainya umat beragama dan memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antarumat beragama. Alasan lain adalah untuk mencegah konflik beragama guna memantapkan ketahanan dan integrasi bangsa. *Kedua*, mendesak pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). *Ketiga*, meminta berbagai pihak agar tidak apriori terhadap pembahasan RUU KUB tersebut dengan menyikapinya secara jernih, proporsional, dan rasional. MUI berasalan, bahwa RUU KUB tidak bermaksud mencampuri doktrin

agama, melainkan pengaturan hubungan antarumat beragama guna memberikan kepastian hukum terhadap kerukunan umat beragama (Ahmad, 2016:211).

Apapun produk dan proses ratifikasi aturan ini, hal terpenting adalah adanya kesadaran akan pentingnya hakekat pluralisme dan adanya struktur sosial yang *fair* dalam mengekspresikan keyakinan baik antar agama, maupun intra agama akan mampu mewujudkan agama sebagai salah satu perekat sosial (*social cement*) dalam arti yang luas. Sementara sikap yang bersandikan pada klaim kebenaran (*truth claim*) yang radikal dan fundamentalistik akan lebih memunculkan agama sebagai faktor penyebab konflik sosial (Rosidin, 2015:66). Dalam studi agama, para ilmuwan secara umum mengelompokkan agama-agama yang ada didunia ini berdasarkan karakter utamanya kepada agama misi dan agama non misi (Rosidin, 2015, hal. 38-39). Karena itu Bolong mengatakan, pelaksanaan misi keagamaan di Indonesia harus memerhatikan akan perbedaan yang sudah terbentuk sehingga tidak menyebabkan konflik. Indonesia adalah nama untuk suatu realitas yang majemuk. Ia adalah rumah dari penduduk dengan beranekaragam budaya, adat-istiadat, keyakinan, tradisi, struktur sosial, sistem politik dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi dan dakwah keagamaan, perbedaan tersebut harus mengedepankan saling menjaga dan menghormati perasaan masing-masing pemeluk agama. Atas dasar inilah, mereka yang diutus dalam menjalankan tugas misi dan dakwah perlu menghargai perbedaan. Kecurigaan dan konflik timbul karena seseorang tidak saling menghargai perbedaan. Agar tidak terjadi konflik dan kecurigaan, mereka yang mendapat tugas

khusus misi atau dakwah mesti meleburkan diri dalam lingkungan kebudayaan tempat mereka diutus, dengan tetap bergerak di atas batas-batas budaya mereka sendiri (Bolong, 2013:167-169).

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah, semua itu sebuah pilihan dengan segala konsekuensinya. Dengan segala dinamika dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, diantaranya terdapat lima strategi dasar dalam menyelesaikan konflik yaitu; 1) *Contending* (bertanding, bersaing), 2) *Problem Solving* (pemecahan masalah), 3) *Yielding*, (mengalah), 4) *Inaction* (diam), dan 5) *Withdrawing* (menarik diri) (Pruit & Rubin, 2011:56-59). Suseno mengajukan beberapa strategi untuk menciptakan perdamaian, diantaranya; 1) semuanya harus kembali ke akar mereka masing-masing untuk mencari “dasar-dasar normatif toleransi”, 2) melalui membangun hubungan yang positif antara komunitas agama yang berbeda tidak cukup dengan seruan-seruan moral secara umum saja, 3) tokoh-tokoh agama yang formal maupun informal memegang tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan hal-hal yang kondusif yang tidak menyebabkan terangsang seseorang untuk konflik (Suseno, 2003: 129-130). Menurut Gus Dur, penanaman nilai-nilai moral dapat dilakukan melalui pendidikan dan kearifan lokal. Adat-istiadat dalam suatu masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adat yang berlaku menjadi landasan moral dalam berperilaku. Kearifan lokal yang terbentuk dari tradisi dan lokalitas ajaran mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang (Nurcholish, 2014:150).

Kearifan lokal sebagai kebudayaan, bukan sekedar wadah dari adat-adat,

kegunaan-kegunaan, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan, melainkan sebagai serangkaian mekanisme kontrol, kontrol sosial (*social control*) dari rencana-rencana, anjuran-anjuran, aturan-aturan, instruksi-instruksi untuk memandu perilaku demi terciptanya *social order*, bukan *social disorder* (Leege & Kellstedt, 2006:12-13). Kearifan lokal bersifat lintas perbedaan yang dapat memasukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini “ideologi buta warna” tidak berlaku, karena (a) mengakui dan menghargai perbedaan, (b) mengajar dan belajar tentang perbedaan, dan (c) menjembatani perbedaan melalui persahabatan pribadi dan aliansi organisasi. Perbedaan tersebut menyangkut pada beberapa perbedaan (misalnya, ras, etnis, agama, identitas seksual, dsb) dan mengabaikan orang lain (yaitu, kelas dan jenis kelamin), karena itu harus menghindari “ideologi buta warna” (McCabe, 2011: 521).

## SIMPULAN

Kebhinekaan adalah suatu keharusan dalam hidup, karena semua itu adalah kodrat. Berbicara kodrat terkait dengan kehendak-Nya, manusia tidak bisa menghalangi apabagi membatalkan hukum Tuhan. Kesadaran akan semua itu hendaknya diimbangi juga dengan pemahaman akan etika kodrati. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang berhubungan dengan perilaku baik, buruk, larangan atau anjuran. Berdasarkan hal tersebut etika sangat diperlukan dalam melakukan relasi sosial dengan insan yang berbeda, sehingga terhindar dari konflik baik yang bersifat *manifest* maupun *latten* dengan semikian akan menghasilkan *social order*, bukan *social disorder*. Peningkaran terhadap perbedaan sama artinya dengan

pengingkaran terhadap kehendak-Nya. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk mencerdaskan seseorang, pendidikan seharusnya dapat membuat manusia menjadi insan merenung akan hakekat masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian yang beretika dengan mengedepankan rasional bukan emosional. Pendidikan bisa lewat kurikulum dengan mencanangkan pendidikan multikultural. Begitu juga melalui merevitalisasi kearifan lokal. berdasarkan pengalaman sejarah konflik di Indonesia, khususnya pasca reformasi tahun 1998, konflik yang terjadi pada umumnya selalu bersentuhan dengan agama, bukan karena kearifan lokal. Dalam kondisi semacam ini, kearifan lokal mempunyai kontribusi dalam menyelesaikan masalah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, R. 2016. Fatwa Hubungan Antaragama. In R. Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia, Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya* (pp. 2-3). Jakarta: Gramedia.
- Alatas, S. F. 2006. From Jami`ah to University Multiculturalism and Christian-Muslim Dialogue. *Current Sociology*, Vol.54, 112-113.
- Anonim.. 2015. How Does the Majority Public React to Multiculturalist Policies? A Comparative Analysis of European Countries. *American Behavioral Scientist*, Vol. 59, 748.
- As-Sirjani, R. 2015. *The Harmony of Humanity*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azra, A. 2003. Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-baru Ini: Kemuduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme. In Anonim, *Konflik-Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (p. 74). Jakarta: INIS.
- Badudu, Z. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Belinda, S. 2002. Narrating Community: Multiculturalism and Australia's SBS Television. *Journal of Communication Inquiry*, 391.
- Bolong, B. 2013. *Paradigma Misi Kesejahteraan Islam & Kristen*. Yogyakarta: San Juan.
- Colombo, E. 2015. Multiculturalisms: An overview of multicultural debates in western societies. *Current Sociology*, Vol. 63, 801.
- Dijk, T. A. 1999. Rasisme Baru Dalam Pemberitaan Media. In S. Kartika, *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multikultural dalam Media* (p. 4). Jakarta: LSPP.
- Dylla, C. H., & Faircloth, S. 2014. A Feather in Her Cap. *Journal of Cases in Educational Leadership*, 111.
- Erwin, K. S. 2001. Multiculturalism, Diversity, And African American College Students Receptive, yet Skeptical? *Journal of Black Studies*, Vo. 31, 772.
- Han, A. G. 2008. Building a Harmonious Society and Achieving Individual Harmony. *Journal*

- of *Chines Political Science*, 113.
- Ida, L. 2010. Menghargai dan Mencari Figur Penggati Gur Dur. In Z. Misrawi, *Santri Par Excellence, Teladan Sang Guru Bangsa* (pp. 7-8). Jakarta: Kompas.
- Kirkham, S. 2016. Constructing multiculturalism at school: Negotiating tensions . *Discourse & Society*, 1.
- Kompas. 2015. *Kasus Diskriminasi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.com.
- Leege, D. c., & Kellstedt, L. 2006. *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor.
- McCabe, J. 2011. Multiculturalism: An Interactionist Analysis . *Journal of Contemporary Ethnography*, 521.
- Nasikun. 2014. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nurcholish, A. 2014. *Pendidikan Perdamaian Gur Dur*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Nurcholish, A. 2015. *Pendidikan Perdamaian Gur Dur*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Philips, G. 2016. *Melampui Pluralisme*. Malang: Madani.
- Pruit, D., & Rubin, J. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ronowidjojo, C. D. 2010. Harmoni Indonesia Raya di Tengah Jelaga Dekadensi. In J. Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa* (pp. 59-60). Jakarta: Gramedia.
- Rosidin, D. N. 2015. Agama Dalam Bingkai Konflik. In A. Fanani, M. Jamil, & I. Sari, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (pp. 38-39). Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Schubert, J. D. 2002. Defending Multiculturalism From Hegemony to Symbolic Violence. *American Behavioral Scientist*, Vol.45 No.7, 1088.
- Smith, H. 2008. *Agama-Agama Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sukmana, O. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Instrans Publishing.
- Supriyono. 2016. Memperkuat Social Paedagogy untuk Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Seminar Nasional merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan* (pp. 3-4). Malang: Pusat Pengkajian Pancasila.
- Suseno, F. M. 2003. Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia. In Anonim, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (pp. 120-130). Jakarta: INIS.
- Teasley, M., & Tyson, E. 2007. Cultural Wars And The Attack On Multiculturalism. *Journal of Black Studies*, Vo. 37, 390-391.
- Turmudi, E. 2000. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Konflik Keagamaan dan Upaya

- Melakuka Integrasi Sosial di Antara Para Pemeluk Agama. In I. Qoyim, *Agama dan Keutuhan Sosial* (pp. 147-148). Jakarta: LIPPI.
- Ule, S. 2015. *"Melakukan Teologi" di Abad Plural*. Maumere: Ledalero.
- Zainuddin, A. R. 1996. Islam dan Masalah Integrasi. In S. bahar, & A. Tangdililing, *Integrasi nasional, Teori, Masalah dan Strategi* (p. 101). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zein, D. 2014. *Kumpulan Khutbah Jum'at Sepanjang Jaman*. Surabaya: DAFA Publishing.